

Implementasi sanksi penundaan penyaluran dana alokasi umum (DAU): studi: keterlambatan penyampaian laporan APBD tahun anggaran 2011-2015 = Implementation of fine's delay of general purpose transfer distribution: study case: delay in submission of APBD report for fiscal year 2011-2015

Rysa Yulianda, author

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=20457543&lokasi=lokal>

Abstrak

ABSTRACT

Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana implementasi sanksi penundaan Dana Alokasi Umum dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Sanksi Penundaan DAU merupakan sanksi yang diberikan kepada daerah yang telat menyampaikan laporan keuangannya kepada pemerintah pusat. Pada implementasi tahun 2011 hingga 2015 terjadi kenaikan atau penurunan terhadap daerah yang dikenakan sanksi penundaan. Metode penelitian yang digunakan adalah post positivist. Hasil penelitian ini adalah bahwa implementasi kebijakan belum berjalan dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari hambatan yang ditemui oleh DJPK seperti gangguan sinyal dan kuantitas serta kualitas dari sumber daya manusia yang ada. Selain itu faktor yang mempengaruhi implementasi yaitu faktor sumber daya dan faktor komunikasi antar organisasi. Faktor lain yang ditemukan dan juga mempengaruhi implementasi yaitu faktor politis, mutasi di daerah, dan ketidaksiapan daerah terhadap kebijakan baru.

<hr>

ABSTRACT

This research purpose to see how implementation of fine 's delay of General Purpose Transfer and the factors that influence it. Fine 's delay of DAU is fine given to regions that are late in submitting their financial statements to the central government. In the implementation of the year 2011 to 2015 occur an increase or decrease to regions that subject to fine 's delay. Research method used is post positivist. The result of this research is that implementation of the policy is not running well despite. It 's can be seen from the obstacles encountered by DJPK such as disturbance and quality of existing human resources. In addition, the factors that influence is political factors, mutations in the regions, and unpreparedness in regions to against the new policy.